



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN GUNUNGPATI TAHUN 2016-2021



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, demikian ungkapan yang kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunungpati tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini menjelaskan berbagai hal seperti latar belakang penulisan, dasar hukum penulisan, tujuan penulisan, gambaran organisasi, berbagai potensi kewilayahan, (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan), gambaran pelaksanaan kinerja, kesimpulan serta saran konstruktif untuk efektivitas penyelenggaraan urusan, program dan kegiatan di kecamatan untuk kurun waktu Lima Tahun kedepan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, meliputi segenap unsur pimpinan seperti Kapolsek Gunungpati, Danramil 07/BS Gunungpati, Kepala KUA Gunungpati, segenap Kepala UPTD se-Kecamatan Gunungpati, Kepala SMP, Lurah se-Kecamatan Gunungpati, para tokoh masyarakat serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Renstra ini. Kami berharap kerjasama ini dapat terus dilanjutkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Gunungpati.

Kami menyadari bahwa dokumen Renstra ini masih jauh dari sempurna. Berkaitan dengan itu, masukan, kritik dan saran sangat kami perlukan untuk melakukan perbaikan terutama pada saat penyusunan dokumen serupa di masa-masa yang akan datang.

Demikian, Renstra yang kami susun semoga dapat bermanfaat kepada Kecamatan Gunungpati sendiri dan pihak-pihak yang membutuhkan data berkaitan dengan Kecamatan Gunungpati.

Semarang, Desember 2017

CAMAT GUNUNGPATI



RONNY T.NUGROHO,S.Sos,MM

Pembina

NIP.19690323 198803 1 001

KECAMATAN GUNUNGPATI TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengharuskan setiap daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 telah mengamanatkan pada Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah secara efektif, sistematis dan terarah yang dimulai dari rencana 5 (lima) tahun atau Renstra kemudian berjenjang ke rencana 1 (satu) tahun atau Renja. Renstra tahun 2016-2021 merupakan penjabaran periode ke- III dari RPJPD.

Renstra Kecamatan Gunungpati tahun 2016-2021 ini disusun mengacu pada Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan selama periode masa jabatan. Renstra Kecamatan Gunungpati disusun secara transparan dan partisipatif yaitu menampung seluruh masukan pejabat terkait, karyawan Kecamatan dan Kelurahan, Muspika

serta tokoh-tokoh masyarakat, dimaksudkan untuk bisa menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap, menyeluruh dan dapat menyesuaikan kondisi lingkungan untuk dapat dilakukan perubahan/perbaikan sesuai dengan tuntutan kondisi strategis di Wilayah. Dengan demikian penyusunan Renstra Kecamatan Gunungpati merupakan pedoman bagi alur pembangunan wilayah dengan seluruh Muspika di wilayah Kecamatan Gunungpati.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Gunungpati Tahun 2016-2021 disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
 18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8) ;

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 61) ;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 98).
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang;
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan yang bersifat teknis strategis jangka menengah 5 tahun dengan maksud adalah untuk menyediakan pedoman / acuan

penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan tahunan di lingkungan Kecamatan, sehingga tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Sebagai alat untuk menterjemahkan dan menyelaraskan antara visi, misi dan janji politik Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 dengan tujuan, sasaran dan program prioritas dalam Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 ;
2. Sebagai pedoman pada masing-masing Seksi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Gunungpati dalam menentukan prioritas program dan kegiatan setiap tahunnya sehingga menjadi terintegrasi, terpadu, terarah dan terukur serta berorientasi pada pencapaian hasil serta dampak yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Semarang ;
3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan serta Rencana Program Kerja Tahunan (RPTK) Kelurahan di lingkungan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ;
4. Sebagai dasar pengukuran kinerja tahunan dan lima tahunan terhadap Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang serta pada masing-masing Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan Gunungpati terkait indikator kinerja eselon ;
5. Sebagai acuan bagi masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kewilayahan di lingkungan Kecamatan Gunungpati serta pengawasan atas kinerja Pemerintah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang .

1.4 Sistematika Penulisan

Kedudukan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Kecamatan Gunungpati Tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kecamatan yang penyusunannya didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang Periode 2016-2021 mengacu visi misi Walikota-Wakil Walikota Semarang terpilih;
2. Dokumen Renstra harus sinkron dan sinergis dengan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.
3. Rencana strategis menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya hingga tahun 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Gunungpati Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas ,fungsi dan struktur organisasi
 - 2.1.1 Tugas Kecamatan
 - 2.1.2 Fungsi Kecamatan
 - 2.1.3 Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber daya kecamatan Gunungpati
 - 2.2.1 Sumber daya manusia

	2.2.2 Sumber daya alam (kewilayahan)
	2.2.3 Sarana dan prasarana
	2.3 Hasil kinerja pelayanan kecamatan
	2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
BAB III	: Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah
	3.1 Identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi OPD
	3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
	3.3 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
	3.4 Penentuan isu-isu strategis
BAB IV	: Tujuan Dan Sasaran
	4.1 Tujuan
	4.2 Sasaran
BAB V	: Strategi dan Arah Kebijakan
	5.1 Strategi
	5.2 Arah kebijakan jangka menengah perangkat daerah
BAB VI	: Rencana Program dan Kegiatan, serta pendanaan
	6.1 Penyelesaian permasalahan di kecamatan dengan program dan kegiatan
BAB VII	: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
	7.1 Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VIII	: Penutup
	merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2016-2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.1Tugas Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 sebagai Unsur Perangkat Daerah sekaligus penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik, Kecamatan Gunungpati mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- a. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- b. Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- c. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- d. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan

Camat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- e. penyelenggaraan kerjasama;
- f. penyelenggaraan sekretariat;
- g. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

- j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
- k. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

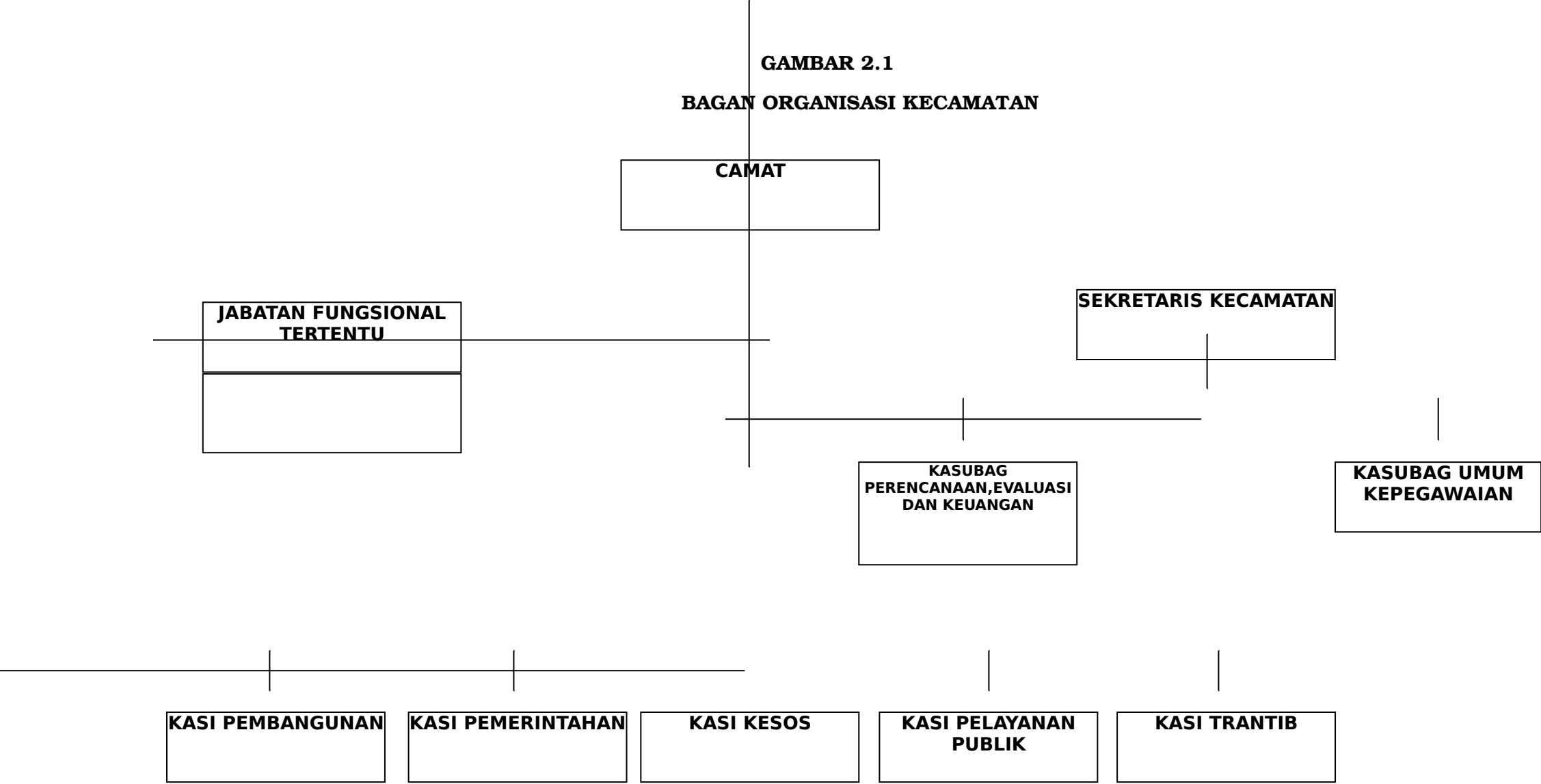
2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan

Struktur Organisasi Kecamatan Semarang Gunungpati terdiri atas beberapa jabatan

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas;
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Publik
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- h. Jabatan Fungsional.

Dengan struktur organisasi Kecamatan Gunungpati sebagai berikut :

GAMBAR 2.1
BAGAN ORGANISASI KECAMATAN



2.2 Sumber Daya Kecamatan Gunungpati

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan / karyawan di lingkungan Kecamatan Semarang Gunungpati Per Oktober tahun 2017 sebanyak 105 ASN dan 49 non ASN orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

TABEL 2.1
DATA PEGAWAI BERDASARKAN ESELON
PER OKTOBER 2017

N o	KELURAHAN	IIIa	IIIb	IVa	IVb	JUMLAH
1	Kecamatan	1	1	5	2	9
2	Pakintelan	-	-	1	4	5
3	Mangunsari	-	-	1	4	5
4	Plalangan	-	-	1	4	5
5	Gunungpati	-	-	1	4	5
6	Nongkosawit	-	-	1	4	5
7	Pongangan	-	-	1	4	5
8	Ngijo	-	-	1	3	4
9	Patemon	-	-	1	4	5
10	Sekaran	-	-	1	4	5
11	Sukorejo	-	-	1	4	5
12	Sadeng	-	-	1	3	4
13	Cepoko	-	-	1	4	5
14	Sumurrejo	-	-	1	4	5
15	Jatirejo	-	-	1	4	5
16	Kalisegoro	-	-	1	4	5
17	Kandri	-	-	1	4	5
	JUMLAH	1	1	21	64	87

Sumber : kasubag umum dan kepegawaian

Menurut golongan pegawai Kecamatan Gunungpati terdiri dari :

TABEL 2.2
DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
PER OKTOBER 2017

N o	KELURAHAN	IV	III	II	I	JUMLAH
1	Kecamatan	2	9	6	-	17
2	Pakintelan	-	5	-	-	5
3	Mangunsari	-	5	-	-	5
4	Plalangan	-	5	-	-	5
5	Gunungpati	-	5	-	-	5
6	Nongkosawit	-	6	-	-	6
7	Pongangan	-	5	-	-	5
8	Ngijo	-	4	1	1	6
9	Patemon	-	5	1	-	6
10	Sekaran	-	6	-	-	6
11	Sukorejo	-	5	1	-	6
12	Sadeng	-	4	1	-	5
13	Cepoko	-	5	-	-	5
14	Sumurrejo	-	5	-	-	5
15	Jatirejo	-	5	1	-	6
16	Kalisegoro	-	6	-	-	6
17	Kandri	-	5	1	-	6
	JUMLAH	2	90	12	1	105

Sumber : kasubag umum dan kepegawaian

Berdasar tingkat pendidikan yang ada sebagai berikut :

TABEL 2.3
DATA PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

PER OKTOBER 2017

N o	KELURAHAN	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	Kecamatan	3	7	2	4	1	-	17
2	Pakintelan	-	3	-	2	-	-	5
3	Mangunsari	-	3	-	2	-	-	5
4	Plalangan	-	3	-	2	-	-	5
5	Gunungpati	-	2	-	3	-	-	5
6	Nongkosawit	-	3	-	3	-	-	6
7	Pongangan	-	4	-	1	-	-	5
8	Ngijo	-	1	1	3	1	-	6
9	Patemon	-	4	-	1	1	-	6
10	Sekaran	-	3	-	3	-	-	6
11	Sukorejo	-	3	-	3	-	-	6
12	Sadeng	-	3	1	1	-	-	5
13	Cepoko	-	2	-	3	-	-	5
14	Sumurrejo	-	2	-	3	-	-	5
15	Jatirejo	-	2	-	3	1	-	6
16	Kalisegoro	-	4	-	2	-	-	6
17	Kandri	1	4	-	1	-	-	6
	JUMLAH	4	53	4	40	4	0	105

Sumber : kasubag umum dan kepegawaian

Sedangkan menurut jenis kelamin sebagai berikut :

TABEL 2.4
DATA PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PER OKTOBER 2017

No	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan	13	4	17
2	Pakintelan	4	1	5
3	Mangunsari	3	2	5
4	Plalangan	3	2	5
5	Gunungpati	3	2	5
6	Nongkosawit	4	2	6
7	Pongangan	3	2	5
8	Ngijo	3	3	6
9	Patemon	4	2	6
10	Sekaran	4	2	6
11	Sukorejo	5	1	6
12	Sadeng	4	1	5
13	Cepoko	3	2	5
14	Sumurrejo	3	2	5
15	Jatirejo	4	2	6
16	Kalisegoro	4	2	6
17	Kandri	4	2	6
	JUMLAH	71	34	105

Sumber : kasubag umum dan kepegawaian

Sedangkan jumlah perangkat yang memenuhi jabatan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.5
JUMLAH PERANGKAT KELURAHAN YANG MEMENUHI JABATAN

KELURAHAN	LURAH	SEKLUR	KASI PEMERINTAHAN dan PEMBANGUNAN	KASI KESOS	KASI TRANTIB
Pakintelan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Mangunsari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Plalangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Gunungpati	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Nongkosawit	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Pongangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Ngijo	Ada	Ada	Ada	-	Ada
Patemon	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Sekaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Sukorejo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Sadeng	Ada	Ada	Ada	-	Ada
Cepoko	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Sumurrejo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Jatirejo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kalisegoro	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kandri	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

SE KECAMATAN GUNUNGPATI TAHUN 2017

2.2.2 Sumber Daya Alam (Kewilayahan)

Gunungpati merupakan kecamatan yang berada di bagian selatan Kota Semarang, berada di ketinggian 259 meter dengan curah hujan rata-rata 1,853 mm/bulan. Luas wilayah keseluruhan sebesar 5.399,085 Ha, terbagi atas 16 kelurahan dengan masing-masing luasan sebagai berikut :

TABEL 2.6
LUAS KELURAHAN DAN JUMLAH RW/RT PER KELURAHAN
SE-KECAMATAN GUNUNGPATI
TAHUN 2017

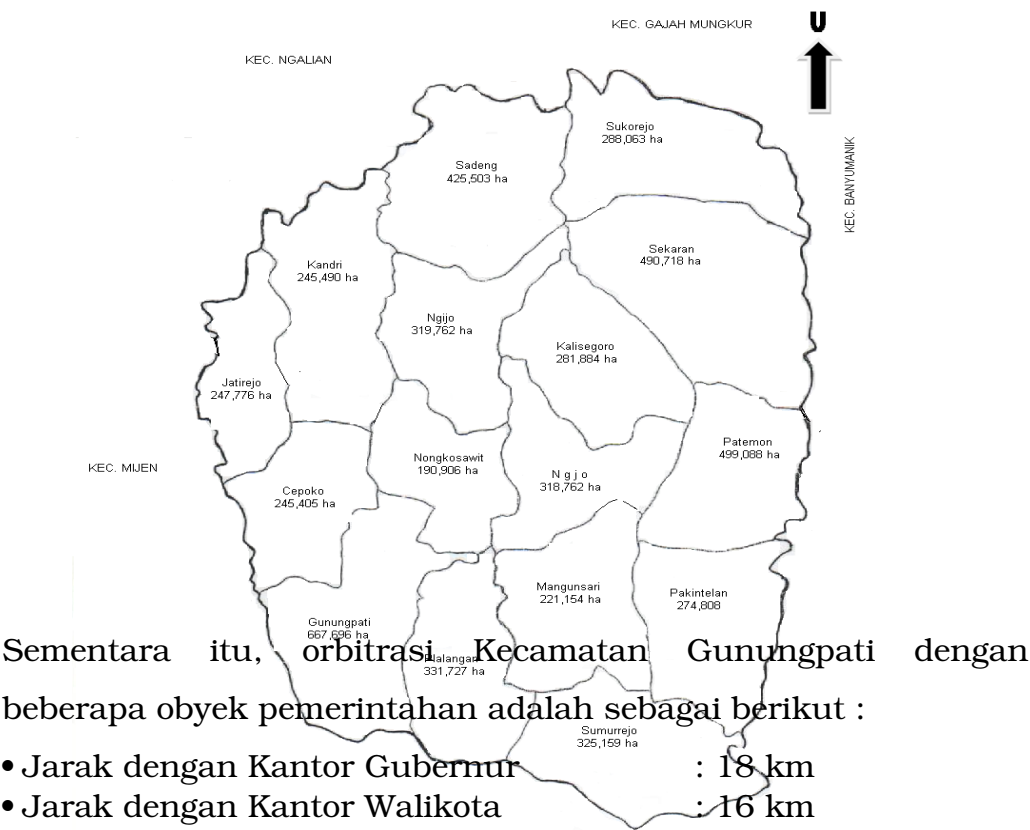
No	KELURAHAN	LUAS (Ha)	JUMLAH		KE T
			RW	RT	
1	Pakintelan	274,808	6	26	
2	Mangunsari	221,540	5	25	
3	Plalangan	331,727	6	19	
4	Gunungpati	667,696	10	44	
5	Nongkosawit	190,909	5	25	
6	Pongangan	343,946	5	28	
7	Ngijo	319,762	3	20	
8	Patemon	499,088	7	21	
9	Sekaran	490,718	7	30	
10	Sukorejo	228,063	12	76	
11	Sadeng	425,503	7	47	
12	Cepoko	245,405	3	17	
13	Sumurrejo	325,159	6	30	
14	Jatirejo	247,776	2	10	
15	Kalisegoro	281,884	3	21	
16	Kandri	245,490	4	26	
	JUMLAH	5.399,085	92	465	

Sumber :Monografi kecamatan Gunungpati semester I tahun 2017

Kecamatan yang sebagian besar wilayahnya berfungsi sebagai lahan konservasi ini memiliki batas-batas :

- Sebelah utara : Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Ngaliyan
- Sebelah selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kecamatan Banyumanik
- Sebelah barat : Kecamatan Mijen dan Kabupaten Kendal

GAMBAR 2.2
PETA KECAMATAN GUNUNGPATI



- Jarak dengan Kantor Gubernur : 18 km
- Jarak dengan Kantor Walikota : 16 km
- Jarak dengan Kabupaten Semarang : 3 km
- Jarak dengan Kabupaten Kendal : 7 km

Jumlah penduduk sampai dengan November 2017 sebesar 90.104 jiwa terdiri atas laki-laki sebesar 45.292 jiwa dan perempuan sebesar 44.812 jiwa dengan rincian sebagaimana matriks di bawah ini :

TABEL 2.7
JUMLAH PENDUDUK PER KELURAHAN
SE-KECAMATAN GUNUNGPATI
SD NOVEMBER 2017

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	Pakintelan	2.700	2.589	5.289	
2	Mangunsari	2.603	2.572	5.175	
3	Plalangan	5.058	2.033	4.091	
4	Gunungpati	3.631	3.634	7.265	
5	Nongkosawit	2.566	2.526	5.092	
6	Pongangan	2.764	2.742	5.506	
7	Ngijo	1.934	1.968	3.902	
8	Patemon	2.564	2.569	5.133	
9	Sekaran	4.271	4.152	8.423	
10	Sukorejo	6.985	6.930	13.915	
11	Sadeng	3.418	3.423	6.841	
12	Cepoko	1.592	1.538	3.130	
13	Sumurrejo	3.186	3.176	6.362	
14	Jatirejo	1.034	1.056	2.090	
15	Kalisegoro	1.658	1.609	3.267	
16	Kandri	2.328	2.295	4.623	
	JUMLAH	45.292	44.812	90.104	

Sumber :Laporan bulanan kependudukan Kecamatan Gunungpati

Sebagian besar warga Kecamatan Gunungpati bermata pencaharian sebagai buruh industri berikutnya buruh bangunan,

buruh tani dan sebagainya dengan urutan sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 2.8
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
DI KECAMATAN GUNUNGPATI
TAHUN 2017

No	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Petani Pemilik Tanah	4.857	
2	Buruh Tani	3.725	
3	Petani Ikan	15	
4	Pengusaha	462	
5	Pengrajin	193	
6	Buruh industri	6.636	
7	Buruh bangunan	5.541	
8	Buruh tambang	16	
9	Buruh perkebunan	298	
10	Pedagang	1.694	
11	Pengangkutan	246	
12	PNS	1.919	
13	TNI/POLRI	308	
14	Pensiunan	453	

Sumber :Monografi kecamatan Gunungpati semester I Tahun 2017

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas berkaitan dengan PATEN , di Kecamatan Gunungpati didukung dengan peralatan dan perlengkapan berupa :

TABEL 2.9
SARANA DAN PRASARANA PATEN
KECAMATAN GUNUNGPATI TAHUN 2017

N o	Kelurahan	Meja Pendaftar an	Meja penyeraha n dokumen	Kursi tungg u	televis i	Sarana pengadua n	Komputer pelayanan	Papan informasi kehadiran personil
	Kecamatan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1	Pakintelan			Ada				
2	Mangunsari			ada				
3	Plalangan	ada	ada	ada	ada	ada		ada
4	Gunungpati			ada				

5	Nongkosawit			ada				
6	Pongangan			ada				
7	Ngijo			ada				
8	Patemon			ada				
9	Sekaran	ada	ada	ada	ada	ada		ada
10	Sukorejo			ada				
11	Sadeng			ada				
12	Cepoko			ada				
13	Sumurrejo	ada	ada	ada	ada	ada		ada
14	Jatirejo			ada				
15	Kalisegoro	ada	ada	ada	ada	ada		ada
16	Kandri	ada	ada	ada	ada	ada		ada

TABEL 2.10
SARANA DAN PRASARANA KANTOR
KECAMATAN GUNUNGPATI TAHUN 2017

NO	JENIS SARPRAS	KETERANGAN/JUMLAH
1	Telepon Otomatis	2
2	Ruang Merokok	1
3	Radio telekomunikasi	1
4	mesin Tik	3
5	Meja Kerja	40
6	Kursi Kerja	40
7	Kursi Chitose	200
8	Lemari/Kardek/Filling Cabinet	23
9	Mesin Hitung	1
10	Alat Ukur	6

11	Alat Pertanian	10
12	Komputer	11
13	Laptop	8
14	Printer	10
15	AC	12
16	Wind Blower	2
17	Exhaust Fan	1
18	Mesin Babat	3
19	Kipas Angin	4
20	Dispenser	3
21	Showcase	1
22	TV	4
23	Sofa	5 set
24	Lemari Kaca JDIH	1
25	Lemari Kaca Souvenir	1
26	Rak Leaflet	2
27	Jam Dinding	6
28	Alat Pengolahan Sampah	1
29	Kamera CCTV	8
30	Tempat bermain anak	1

Sumber :Simbada Kecamatan Gunungpati

Untuk menunjang kegiatan operasional, Kecamatan Gunungpati memiliki jumlah kendaraan sebagai berikut :

- Kendaraan dinas Camat roda 4 sebanyak 1 buah
- Kendaraan dinas Sekretaris Camat roda 4 sebanyak 1 buah
- Kendaraan patroli roda 4 sebanyak 1 buah
- Kendaraan Operasional roda 2 sebanyak 40 buah

- Kendaraan roda tiga sebanyak 20 buah
- Truk sampah sebanyak 2 buah

Jumlah tersebut belum memadai bila dibandingkan dengan beban kerja yang sangat berat, hal ini tentunya perlu pemikiran dan penanganan dimasa mendatang.

2.3 Hasil Kinerja Pelayanan Kecamatan

Pengukuran hasil kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati dapat dilihat dari perbandingan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam 5 (lima) tahun terakhir, yakni dari tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana berikut :

TABEL 2.11
PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN GUNUNGPATI
TAHUN 2010-2015

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM/IK K	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Jumlah TPS yang berada di wilayah Kecamatan	8 TPS	2 TPS	2 TPS	3 TPS	6 TPS	8 TPS	2 TPS	2 TPS	2 TPS	7 TPS	8 TPS	100	100	66,7	116	100
2	Jumlah TPS yang berada di perbatasan dengan wilayah Kecamatan lain	4 TPS	2 TPS	2 TPS	2 TPS	3 TPS	4 TPS	1 TPS	1 TPS	2 TPS	3 TPS	3 TPS	50	50	100	100	75
3	Luas wilayah di Kecamatan yang pengangkutan sampah oleh Pemerintah Kota Semarang	23 Km ²	16 Km ²	16 Km ²	16 Km ²	20 Km ²	23 Km ²	16 Km ²	16 Km ²	16 Km ²	20 Km ²	23 Km ²	100	100	100	100	100
4	Jumlah Kelurahan yang terlayani pengangkutan sampah oleh Pemerintah Kota Semarang	16 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	100	100	100	100	100
5	Volume sampah yang terangkut	27 M ³	2M ³	3M ³	16 M ³	24 M ³	27 M ³	3 M ³	3 M ³	16 M ³	24 M ³	27 M ³	150	100	100	100	100
6	Rata-rata frekuensi	1 kali per	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	150	100	100	100

	pengangkutan sampah oleh truk sampah	hari	per 3 hari	per 3 hari	per 2 hari	per hari	per hari	per3 hari	per 2hari	per 2 hari	perhari	perhari					
7	Jumlah kendaraan pengangkut sampah yang dikelola oleh Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> Sepeda motor roda 3 Kendaraan roda 2 Truk sampah 	16 - 2	2 2 -	3 3 -	3 - -	4 - 1	16 - 2	2 3 -	2 3 -	3 - -	4 - 1	19 - 2	100 150 -	75 100 -	100 - -	100 - 100	118 - 100
8	Jumlah kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	9 KSM	9 KSM	9 KSM	6 KSM	6 KSM	6 KSM	9 KSM	9 KSM	6 KSM	6 KSM	6 KSM	100	100	100	100	100
9	Jenis dan jumlah lapangan olah raga milik umum (bukan milik perseorangan/perusahaan) yang ada di wilayah Kecamatan	3 Jenis - 18 Lap. Sepakbola -3 Lap.Futsal -8 lap.volley	3 Jenis - 17 Lap. Sepakbola -1 Lap.Futsal -2 lap.volley	3 Jenis - 18 Lap. Sepakbola -1 Lap.Futsal -2 lap.volley	3 Jenis - 18 Lap. Sepakbola -1 Lap.Futsal -2 lap.volley	3 Jenis - 18 Lap. Sepakbola -1 Lap.Futsal -3 lap.volley	3 Jenis - 18 Lap. Sepakbola -3 Lap.Futsal -8 lap.volley	3 Jenis - 18Lap Sepakbola -1 Lap.Futsal -2 lap.Volley	3 Jenis - 18Lap Sepakbola -1 Lap.Futsal -2 lap.Volley	3 Jenis - 18Lap Sepakbola -1 Lap.Futsal -2 lap.Volley	3 Jenis - 18Lap Sepakbola -1 Lap.Futsal -6 lap.Volley	3 Jenis - 18 Lap. Sepakbola -3 Lap.Futsal -8 lap.Volley	100	100	100	100	100
10	Jenis dan jumlah lapangan olah raga yang dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Kecamatan	1	-	1	-	2	1	1	1	-	1	1	100	100	-	50	100
11	Jenis, lokasi dan jumlah kejadian bencana alam yang	2 jenis (tanah)	-	-	-	-	2 jenis (tanah)	2 jenis (tanah)	2 jenis (tanah)	2 Jenis (longsor)	2 Jenis (longsor)	2 Jenis (longsor)	-	-	-	-	100

	terjadi di wilayah kecamatan	longsor dan kekeringan)					longsor dan kekerin gan)	longsor dan kekerin gan)	longsor dan kekerin gan)	dan kekerin gan)	dan angin ribut)	dan kekerin gan)					
12	Jumlah korban bencana alam yang terjadi di wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jumlah perkiraan kerugian yang diderita akibat bencana alam (dirinci tiap kejadian bencana)	150.000.000	-	-	-	-	-	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 10.000.000	Bencana longsor (kurang lebih Rp 200.000.000)	Bencana longsor (kurang lebih Rp 20.000.000) kekerin gan kurang lebih (10.000.000)					
14	Jumlah sarana dan prasarana pemerintah yang dibangun																
	🏠 Kantor Kecamatan	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0						
	🏠 Rumah Dinas Camat	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0						
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

	<div> <div>Kantor Kelurahan</div> <div>Rumah Dinas Lurah</div> <div>Balai Kelurahan</div> </div>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		3	2	2	0	2	0	2	2	0	1							
15	Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan yang diperbaiki																	
	• Kantor Kecamatan	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	100	100	0	0	100	
	• Rumah Dinas Camat	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	-	100	0	0	-	
	• Kantor Kelurahan	16	-	2	2	10	8	-	-	3	12	9	-	0	120	150	112	
	• Rumah Dinas Lurah	16	-	2	0	10	0	-	-	0	8	0	-	0	80	800	-	
	• Balai Kelurahan	16	-	-	1	10	2	-	-	2	12	2	-	-	120	600	100	
16	Jenis dan jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Kecamatan.	21	1	1	3	26	21	1	1	3	26	21	100	100	100	100	100	
17	Jenis dan jumlah sarana dan prasarana umum yang diperbaiki oleh Pemerintah Kota Semarang melalui kecamatan	30	21	50 lokasi	-	-	-	24 lokasi	24 lokasi	-	-	-	114	45	-	-	-	

18	Jumlah pengaduan masyarakat kepada kecamatan atas pelayanan publik	10 pengaduan	2 pengaduan	2 pengaduan	2 pengaduan	3 pengaduan	3 pengaduan	2 pengaduan	2 pengaduan	4 pengaduan	3 pengaduan	3 pengaduan	100	100	200	100	100
19	Jumlah pengaduan yang dapat ditangani dan diselesaikan kecamatan	10 pengaduan	2 pengaduan	2 pengaduan	2 pengaduan	3 pengaduan	3 pengaduan	2 pengaduan	2 pengaduan	4 pengaduan	3 pengaduan	3 pengaduan	100	100	200	100	100
20	Jumlah pengaduan yang diteruskan kepada unit kerja /PD/Instansi terkait	10 pengaduan	1 pengaduan	2 pengaduan	2 pengaduan	3 pengaduan	3 pengaduan	2 pengaduan	2 pengaduan	4 pengaduan	3 pengaduan	3 pengaduan	100	100	200	100	100
21	Jumlah dan jenis kegiatan swadaya masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik di lingkungan	480	457	150	153	227	217	455	150	153	227	217	99	100	100	100	100
22	Nilai swadaya masyarakat	Rp 1.900.00 0. 000	Rp 2.500.0 00.000	Rp 200.00 0.000	Rp 150.00 0.000	Rp 500.00 0.000	Rp 1.900.0 00. 000	Rp 1.460.6 02.495	Rp 280.09 5.000	Rp 181.00 0.000	Rp 1.806.7 15.200	Rp 2.542.5 60.000	58	140	120	361	133
23	Jumlah keluarga miskin di wilayah kecamatan	6.000 KK	7.200 KK	6.800 KK	6.400 KK	6.000 KK	6.000 KK	7.132 KK	7.132 KK	6.302 KK	6.302 KK	5.726 KK	99	104	98	105	95

Sedangkan tabel pendanaan Indikatif dan realisasi tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2010 S/D 2015

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI FISIK					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	anggaran	realisasi
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	46,692,000	57,300,000	62,356,000	110,877,500	64,226,680	46,574,000	57,300,000	58,352,000	101,369,500	105,084,753	100	100	100	100	100	1.00	1.00	0.94	0.91	1.64	290,070,836	284,612,451
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	8,500,000	8,000,000	8,755,000	8,240,000	9,017,650	8,500,000	8,000,000	25,000,000	22,000,000	66,927,000	100	100	100	100	100	1.00	1.00	2.86	2.67	7.42	35,298,530	76,885,400
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	100,000,000	-	-	-	-	99,410,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0.99	-	-	-	-	100,000,000	99,410,000
Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	49,032,000	46,812,000	50,502,960	48,216,360	52,018,049	44,946,000	44,806,500	32,832,000	-	-	100	100	100	-	-	0.92	0.96	0.65	-	-	204,966,930	100,696,500
Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	102,800,000	101,661,000	105,884,000	104,710,830	109,060,520	72,639,261	74,561,479	98,246,088	93,788,402	117,712,338	100	100	100	100	100	0.71	0.73	0.93	0.90	1.08	436,867,934	362,777,698
Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	34,800,000	35,329,000	35,844,000	36,388,870	36,919,320	34,800,000	36,120,000	42,950,000	42,950,000	49,055,000	100	100	100	100	100	1.00	1.02	1.20	1.18	1.33	149,745,734	166,631,000
Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6,000,500	5,562,000	6,180,515	5,728,860	6,365,930	6,000,500	8,359,000	9,000,000	9,964,000	8,248,000	100	100	100	100	100	1.00	1.50	1.46	1.74	1.30	24,745,061	34,973,100

Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,500,000	1,545,000	1,545,000	1,591,350	1,591,350	1,500,000	11,280,000	10,000,000	3,000,000	3,498,000	100	100	100	100	100	1.00	7.30	6.47	1.89	2.20	6,499,620	26,479,600
Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	77,700,000	91,979,000	80,031,000	94,738,370	82,431,930	77,700,000	83,400,000	87,000,000	89,400,000	92,300,000	100	100	100	100	100	1.00	0.91	1.09	0.94	1.12	360,934,756	355,960,000
Pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	13,900,000	15,450,000	15,913,500	16,390,605	16,882,632	13,446,000	11,949,600	24,566,000	12,515,300	12,731,600	100	100	100	100	100	0.97	0.77	1.54	0.76	0.75	65,030,631	65,023,220
Pelayanan administrasi perkantoran	Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD	56,500,000	60,255,000	58,195,000	62,062,650	59,940,850	52,992,015	80,745,544	111,996,196	81,810,360	112,303,843	100	100	100	100	100	0.94	1.34	1.92	1.32	1.87	249,000,820	350,004,884
Pelayanan administrasi perkantoran	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	6,700,000	6,901,000	7,108,030	7,321,271	7,540,909	6,679,091	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	29,538,483	6,679,091
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor	11,500,000	28,325,000	29,174,750	30,049,993	30,951,492	11,452,726	65,545,000	68,517,000	140,864,866	293,795,000	100	100	100	100	100	1.00	2.31	2.35	4.69	9.49	105,240,041	345,138,592
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan mebelair	5,000,000	5,150,000	5,304,500	5,463,635	5,627,544	4,970,455	4,825,000	29,805,000	179,724,000	-	100	100	100	100	-	0.99	0.94	5.62	32.89	-	22,043,644	84,531,455
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	900,000	927,000	954,810	983,454	1,012,958	900,000	1,200,000	1,200,000	4,675,000	3,200,000	100	100	100	100	100	1.00	1.29	1.26	4.75	3.16	3,967,856	8,615,000

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	75,565,000	21,372,500	22,013,675	22,674,085	23,354,308	72,715,000	61,050,000	73,510,000	62,940,000	168,225,000	100	100	100	100	100	0.96	2.86	3.34	2.78	7.20	146,296,122	303,860,000
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	84,274,000	89,542,020	92,228,281	94,995,129	97,844,983	80,170,000	100,580,500	133,266,000	128,340,000	53,163,070	100	100	100	100	100	0.95	1.12	1.44	1.35	0.54	380,608,426	452,989,114
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2,000,000	2,060,000	2,121,800	2,185,454	2,251,018	2,000,000	4,997,000	3,800,000	5,000,000	6,485,000	100	100	100	100	100	1.00	2.43	1.79	2.29	2.88	8,817,458	17,094,000
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1,000,000	1,030,000	1,060,900	1,092,727	1,125,509	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	100	100	100	100	-	1.00	0.97	0.94	0.92	-	4,408,729	4,000,000
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rehabilitasi sedang/besar gedung kantor	331,404,500	350,200,000	360,706,000	371,527,180	371,527,180	328,062,228	-	-	1,401,517,000	726,703,000	100	-	-	100	100	0.99	-	-	3.77	1.96	1,488,143,116	1,971,813,561
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24,516,000	24,015,480	24,735,944	25,478,023	26,242,363	24,057,500	8,740,000	7,175,000	6,912,000	5,000,000	100	100	100	100	100	0.98	0.36	0.29	0.27	0.19	103,993,920	47,884,500
Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	40,800,000	43,878,000	45,194,340	46,550,170	47,946,675	40,800,000	34,500,000	480,535,000	1,079,100,000	1,456,350,000	100	100	100	100	100	1.00	0.79	10.63	23.18	30.37	186,011,845	1,926,205,000
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	40,780,000	45,835,000	47,210,050	48,626,352	50,085,142	40,780,000	36,820,000	37,069,000	130,699,300	94,330,000	100	100	100	100	100	1.00	0.80	0.79	2.69	1.88	192,468,430	264,234,300

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	22,900,000	23,587,000	24,294,610	25,023,448	25,774,152	22,900,000	20,960,000	22,860,000	25,700,000	51,100,000	100	100	100	100	100	1.00	0.89	0.94	1.03	1.98	100,959,889	102,640,000
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4,915,000	57,886,000	59,622,580	61,411,257	63,253,595	49,125,000	45,032,000	41,630,000	78,249,000	67,950,000	100	100	100	100	100	9.99	0.78	0.70	1.27	1.07	196,485,556	227,626,000
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang	109,780,000	113,300,000	116,699,000	120,199,970	123,805,969	108,630,000	98,294,000	178,816,000	943,678,000	1,723,472,000	100	100	100	100	98.7	0.99	0.87	1.53	7.85	13.92	484,740,164	1,674,112,400
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum	13,450,000	18,128,000	18,671,840	19,231,995	19,808,955	13,150,000	30,755,000	57,475,000	307,195,000	272,078,000	100	100	100	100	100	100	1.70	3.08	15.97	13.74	73,443,626	462,990,600
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan	21,500,000	22,145,000	22,809,350	23,493,631	24,198,439	21,035,000	42,998,500	60,390,050	60,621,200	164,253,950	100	100	100	100	100	0.98	1.94	2.65	2.58	6.79	94,787,668	217,895,540
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan SKPD	50,000,000	51,500,000	53,045,000	54,636,350	56,275,441	49,752,726	20,875,000	35,000,000	-	-	100	100	100	-	-	1.00	0.41	0.66	-	-	220,436,438	82,294,393

Analisis Capaian Kinerja

Perkembangancapaian kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan matriks IKK tahun 2010 s/d 2015 di atas disimpulkan sebagai berikut :

1. Selama 5 (lima) tahun terakhir Kecamatan Gunungpati melaksanakan 2 program yang berasal dari Pemerintah Pusat yaitu program pengendalian dan perusakan lingkungan hidup serta program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.
2. Pelaksanaan kinerja selama ini berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur (SOP)*, yang disusun dalam bentuk standar pelayanan publik berdasarkan Permen PAN Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Keputusan Menteri PAN Nomor : KEP/63/M.PAN/02/2003, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Terjadi peningkatan volume pengangkutan sampah ke TPA, jumlah TPS dan kelurahan yang terlayani pengangkutan sampah dan kebersihan tiap tahunnya.
4. Terdapat peningkatan jumlah pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana olahraga di wilayah Kecamatan Gunungpati tiap tahun.
5. Selama 5 tahun terjadi beberapa bencana alam di wilayah Kecamatan Gunungpati, antara lain angin ribut, tanah longsor, dan kekeringan yang menimbulkan kerugian materi, namun tidak menimbulkan korban jiwa.
6. Berdasarkan data tabel diatas selama 5 tahun perbaikan sarana dan prasarana maupun pembangunan sarana dan prasarana kantor mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
7. Selama 5 tahun terdapat 14 aduan masyarakat yang tercatat oleh Kecamatan Gunungpati dan semuanya bisa diselesaikan

baik secara langsung maupun melalui Pemerintah Kota Semarang.

8. Kecamatan gunungpati dalam 5 tahun terakhir jumlah usulan pembangunan yang didapat dari usulan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang mengalami peningkatan terutama dari segi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang.
9. Jumlah usulan/ swadaya masyarakat selama 5 tahun terakhir berdasar tabel diatas selalu meningkat tiap tahunnya, hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan sosial kemasyarakatan yang kebanyakan dananya diambilkan dari swadaya masyarakat .
10. Dari data tabel diatas selama 5 tahun terkahir jumlah KK miskin terus mengalami penurunan dengan jumlah KK miskin pada tahun 2015 sebesar 5.726 KK.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sesuai Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Kota Semarang, mempunyai peluang sekaligus tantangan guna peningkatan pelayanan pada masyarakat

Karakteristik isu strategis adalah kondisi penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Untuk memperoleh rumusan isu strategis diperlukan analisis terhadap fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih sebagai isu strategis dengan menggunakan analisis lingkungan. Dari analisis diatas muncullah akar permasalahan yang ada di Kecamatan Gunungpati sebagai berikut :

TABEL 2.13
TANTANGAN DAN PELUANG PADA KECAMATAN GUNUNGPATI

Tantangan	Peluang
1. Kurang diminati investor tertentu, missal investor properti	1. Diminati investor wisata,terutama wisata alam dan agro
2. Lambatnya penataan SDM di Kecamatan Gunungpati	2. Memiliki 2 desa wisata : a. Desa Wisata Kandri b. Desa Wisata Nongkosawit
3. Insfrastruktur kurang memadai	3. Masih kuatnya potensi kesenian adat dan tradisional
4. Sarana dan Akses masuk ke wilayah Kecamatan Gunungpati terbatas	4. Merupakan lokasi Universitas Negeri Semarang dan Waduk Jatibarang
5. Sebagian wilayah merupakan daerah rawan bencana	

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi masyarakat di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan menghilangkan peluang. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Gunungpati adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1
PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI PELAYANAN

NO	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
1	2	3
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP
		Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
		Belum optimalnya budaya kerja aparatur
		Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur perlu ditingkatkan
2.	Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan
		Masih kurangnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman

		lingkungan
		Kuantitas dan kualitas anggota Linmas belum memadai
3.	Perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan perlu dioptimalkan
		Koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan
4.	Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan perlu ditingkatkan
		Kondisi sarana dan prasarana lingkungan perlu perbaikan dan peningkatan
		Potensi lokal kewilayahan perlu dukungan pembinaan dan pengembangan
5.	Belum optimalnya penanganan kebersihanwilayah Kecamatan/Kelurahan	Pengelolaan kebersihanwilayah perlu ditingkatkan secara berkelanjutan
6.	Belum optimalnya program PHBS dan LHBS di wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat perlu ditingkatkan
7.	Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan	Perlu peningkatan tertib pencatatan dan pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan
8.	Belum optimalnya penerimaan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan / Kelurahan	Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

3.2 Telaahan Visi,Misi,dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kota Semarang untuk lima tahun kedepan yaitu“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera” Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang

kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, mengandung arti bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memerhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, nilai investasi yang semakin besar, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun. Hal-hal tersebut didukung oleh adanya tata kelola birokrasi yang baik yang dilihat melalui peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

SEJAHTERA, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan Kota Semarang yang Hebat ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

Adapun visi diatas dijabarkan lebih lanjut dalam 4 misi :

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan

derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

Misi 2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Misi 3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Kota Semarang dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten di daerah. Karena itulah, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Semarang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:

“Bergerak Bersama Membangun Semarang”

Makna slogan Bergerak Bersama Membangun Semarang diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangsihkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Semarang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan visi dan misi, maka visi dan misi tersebut dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan HEBAT, yang merupakan akronim dari Healthiness (kesehatan), Education (pendidikan), Building (infrastruktur fisik), Attitude (perilaku) dan Trading (perdagangan). Fokus kerja tersebut memberi arahan kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian visi dan misi. Pencapaian visi dan misi selanjutnya juga didasarkan pada pola berpikir dan

bekerja dengan konsep Think Globally Act Locally, dimana seluruh pelaku kepentingan pembangunan di Kota Semarang diharapkan akan berpikir dan bertindak secara kreatif dan berkelanjutan dengan tetap memerhatikan ciri khas, nilai-nilai luhur dan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kota Semarang namun dengan orientasi hasil yang berskala global atau internasional. Pembangunan Kota Semarang diarahkan agar hasilnya dapat dikenal dan menjadi rujukan dunia internasional.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang merupakan penjabaran RTRWN dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota dalam jangka 20 tahun. RTRW Kota Semarang 2011-2031 merupakan hasil evaluasi dan revisi dari RTRW Kota Semarang Tahun 2000-2010 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Kota Semarang Tahun 2000 sampai Tahun 2010. Karena dalam perkembangannya Kota Semarang telah Kota Semarang terus tumbuh, dan rujukan tentang kebijakan pembangunan wilayah dan kota terus berkembang, maka Kebijakan penataan ruang perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang ada

Wilayah Kecamatan Gunungpati sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 kawasan Gunungpati dalam Rencana Pembagian Wilayah Kota (BWK) masuk BWK VIII dengan luas kurang lebih 5.399 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) dengan rencana pengembangan fungsi utama sebagai pusat Pendidikan .

Wilayah Kecamatan Gunungpati yang termasuk dataran tinggi merupakan daerah resapan air dan ruang terbuka hijau. Keberadaan Waduk Jatibarang yang berfungsi sebagai penampung air juga sebagai sarana wisata alam di Wilayah Kecamatan Gunungpati. Kawasan Gunungpati juga ditetapkan sebagai kawasan hutan raya yaitu Kawasan Goa Kreo dan Kawasan Hutan Tinjomoyo. Kawasan taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi, serta pelestarian budaya berupa hutan konservasi dan tidak dapat dialihfungsikan. Kecamatan Gunungpati juga dikembangkan sebagai wisata pertanian (agrowisata) .

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun lima tahun kedepan, Kecamatan Gunungpati dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif terutama dalam rangka menghadapi perubahan paradigma masyarakat di wilayah Kecamatan Gunungpati.

Perencanaan arah pembangunan di wilayah Kecamatan Gunungpati hendaknya memperhatikan perubahan kondisi wilayah dan masyarakat sehingga tujuan dari pembangunan tepat tujuan dan sasaran.

Memperhatikan isu-isu yang ada, permasalahan pembangunan dan tujuan pelayanan pada masyarakat yang bertujuan pada *good governance*, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik ;
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan;
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan

Lingkungan Hidup Bersih Sehat (LHBS).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

4.2 Sasaran

Sasaran, merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur atau sesuatu yang ingin dicapai secara nyata sesuai dengan interval waktu pencapaian yang telah disepakati. Sasaran, menggambarkan pula fokus penyusunan kegiatan sehingga dapat bersifat spesifik, rinci, terukur dan logis untuk dicapai. Adapun matrik Tujuan, sasaran indikator dan target dapat dilihat pada matrik dibawah ini :

TABEL 4.1

MATRIK TUJUAN, SASARAN,INDIKATOR DAN TARGET

KECAMATAN GUNUNGPATI TAHUN 2016 - 2021

Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target Capaian					Target
				2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya birokrasi tata kelola pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka indeks	-	79	81	83	85	87	87
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang memberdayakan masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	75.45	79.32	80.25	81.17	81.95	83.17	83.17
1 Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan OPD	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	%	21	21.12	21.95	22.36	23.07	23.39	23.39

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan, dirancang secara konseptual, realistis dan sesuai kondisi yang ada. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra dibutuhkan strategi.

5.2 Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Kemudian, arah kebijakan adalah arah/tindakan yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan RENSTRA. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam pengelolaan program-program kegiatan pembangunan, maupun eksternal yaitu dalam rangka mengatur, memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan. Adapun strategi dan kebijakan disusun berdasar tujuan dan sasaran OPD , maka keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5.1
MATRIK KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI,

DAN ARAH KEBIJAKAN
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG TAHUN 2016 – 2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang memberdayakan masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	1. Peningkatan wilayah Kecamatan yang bersih dan sehat berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kebersihan wilayah Kecamatan dan Kelurahan secara berkelanjutan
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan lingkungan bersih serta sehat
		2. Peningkatan ketertiban dan ketentraman lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan serta perlindungan masyarakat
		3. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan representatif
			Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal wilayah Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, dan melayani	Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan OPD	4. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan
		5. Peningkatan pendayagunaan aset Kecamatan/ Kelurahan	Meningkatkan manajemen pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan
		6. Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Mengoptimalkan potensi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan dan Kecamatan secara intensif
		7. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungpati	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Kecamatan Gunungpati
			Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Kecamatan Gunungpati
			Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan Gunungpati
		8. Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

Sedangkan sasaran kinerja per eselon dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5.2
SINKRONISASI SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah : Kecamatan Gunungpati

	ESELON II							ESELON III							ESELON IV						
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET 2017	TAR GET 2018	TAR GET 2019	TAR GET 2020	TAR GET 2021	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUT COME)	TAR GET 2017	TAR GET 2018	TAR GET 2019	TAR GET 2020	TAR GET 2021	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUT PUT)	TAR GET 2017	TAR GET 2018	TAR GET 2019	TAR GET 2020	TAR GET 2021
	Meningkatnya Manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan OPD	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pengelolaan aset daerah	Jumlah aset yang dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	344	344	347	350	350	Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan	Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	344	344	347	350	350
		Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase capaian hasil perolehan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	82	84	86	88	90	Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan	Persentase peningkatan jumlah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan dan Kelurahan	82	84	86	88	90
								Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan sarana prasarana pelayanan masyarakat berstandar PATEN	12(2 kel)	37(4 kel)	62 (4 kel)	87 (4ke l)	100 (2 kel)	Pembangunan pusat pembelajaran (BLC)	Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi masyarakat	1	0	2	2	2
									Jumlah pelayanan administratif kepada	30,000	31,000	32,000	33,000	34,000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggara	Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Pemerintahan	16	32	32	48	48

	ESELON II							ESELON III							ESELON IV						
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET 20 17	TAR GET 201 8	TAR GET 201 9	TAR GET 202 0	TAR GET 202 1	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUT COME)	TAR GET 201 7	TAR GET 201 8	TAR GET 201 9	TAR GET 202 0	TAR GET 202 1	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUT PUT)	TARG ET 2017	TARG ET 2018	TARG ET 2019	TARG ET 2020	TARG ET 2021
									masyarakat di Kantor Keamatan dan Kantor Kelurahan						an TataPemerintahan Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan					
															Implementasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Jumlah pelayanan administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
								Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penyediaan jasa komunikasi,su mber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon, air, listrik dan koran kantor	17	17	17	17	17
															Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	25	25	30	30	35
															Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan	6	6	10	10	14
															Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan	12	15	15	20	25
															Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan pada tahun berkenaan	220	230	245	260	275
															Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	15	7	7	9	9

	ESELON II							ESELON III							ESELON IV						
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET 20 17	TAR GET 201 8	TAR GET 201 9	TAR GET 202 0	TAR GET 202 1	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUT COME)	TAR GET 201 7	TAR GET 201 8	TAR GET 201 9	TAR GET 202 0	TAR GET 202 1	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUT PUT)	TARG ET 2017	TARG ET 2018	TARG ET 2019	TARG ET 2020	TARG ET 2021
															Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	0	20	20	22	26
															Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran	Jumlah kegiatan lembur PNS	9	13	13	15	15
															Penyediaan Operasional Kelurahan	jumlah kegiatan operasional kelurahan	0	9	9	10	10
								Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pengadaan kendaraan dinas/operasio nal	Pengadaan kendaraan dinas operasional yang mendukung kerja pegawai	1	0	4	4	4
															Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai	0	8	12	12	15
															Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pengadaan tahun berkenaan	8	8	14	14	18
															Pemeliharaan rutin berkala rumdin	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1	1	1	1	1
															Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	16	16	18	18	20
															Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas /	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada	36	36	40	42	44

	ESELON II							ESELON III							ESELON IV						
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET 20 17	TAR GET 201 8	TAR GET 201 9	TAR GET 202 0	TAR GET 202 1	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUT COME)	TAR GET 201 7	TAR GET 201 8	TAR GET 201 9	TAR GET 202 0	TAR GET 202 1	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUT PUT)	TARG ET 2017	TARG ET 2018	TARG ET 2019	TARG ET 2020	TARG ET 2021
															operasional	tahun berkenaan					
															Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan	8	10	12	12	16
															Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara pada tahun berkenaan	2	2	2	3	3
															Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah perbaikan sedang / berat gedung kantor	0	1	1	2	2
															Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	36	36	40	42	44
								Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan pembantu	Target kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu	100	100	100	100	100
															Penyusunan LKPJ SKPD	Penyusunan dokumen LKPJ	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en
															Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan lap kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2 lapora n	2 lapora n	2 lapora n	2 lapora n	2 lapora n
															Peyusunan LKJ IP	Penyusunan dokumen LKJ IP	1 dokum en	1 dokum	1 dokum	1 dokum	1 dokum

	ESELON II							ESELON III						ESELON IV							
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET 20 17	TAR GET 201 8	TAR GET 201 9	TAR GET 202 0	TAR GET 202 1	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUT COME)	TAR GET 201 7	TAR GET 201 8	TAR GET 201 9	TAR GET 202 0	TAR GET 202 1	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUT PUT)	TARG ET 2017	TARG ET 2018	TARG ET 2019	TARG ET 2020	TARG ET 2021
																		en	en	en	en
															Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en
															Peyusunan laporan keuangan semesteran	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en
															Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en
															Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan Renja SKPD	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en
															Penyusunan RKA perubahan dan DPA perubahan SKPD	Penyusunan dokumen RKA perubahan dan DPA perubahan SKPD	2 dokum en	0	0	0	0
															Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Penyusunan dokumen RKA dan DPA SKPD	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en
															Review dan revisi RENSTRA SKPD	Review dan revisi Renstra	1 dokum en	0	0	0	1
	Meningkatny a kualitas penyelenggar aan pemberdayaa n masyarakat	Cakupan penyelenggar aan pemberdayaa n masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pengendalia n pencemaran perusakan lingkungan	Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana & sarana	Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebanan	0	64	64	64	64

	ESELON II							ESELON III							ESELON IV						
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET 20 17	TAR GET 201 8	TAR GET 201 9	TAR GET 202 0	TAR GET 202 1	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUT COME)	TAR GET 201 7	TAR GET 201 8	TAR GET 201 9	TAR GET 202 0	TAR GET 202 1	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUT PUT)	TARG ET 2017	TARG ET 2018	TARG ET 2019	TARG ET 2020	TARG ET 2021
	n masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	di Kecamatan dan Kelurahan						hidup	dan Kelurahan yang tertangani						persampahan	pohon dll yang dilakukan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan					
									Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kecamatan dan Kelurahan	16 kel	16 kel	16 kel	16 kel	16 kel	Koordinasi penilaian kota sehat / adipura	Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani	100	100	100	100	100
								Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase jumlah sistem keamanan lingkungan (Siskamling) RT	60	70	80	90	100	Pendampingan penegakan perda di Kecamatan dan Pemantauan wilayah rawan trantibum	Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan	80	85	90	95	100
								Peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan	293	299	299	305	305	Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan	jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan	7	9	5	5	5
									Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	2	4	3	3	4	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan	0	7780	7842	7921	8097
															Pemberdayaan LPMK,RW dan RT	Pelaksanaan kgt pemberdayaan LPMK,RT dan RW	13 kgt	0	0	0	0
															Pemberdayaan PKK,karang taruna dan pramuka	Kegiatan pemberdayaan PKK,karang taruna dan pramuka	11 kgt	0	0	0	0
								Peningkatan	Persentase	88	90	93	98	100	Pembinaan	Jumlah kegiatan	34	36	38	40	41

	ESELON II							ESELON III							ESELON IV						
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET 20 17	TAR GET 201 8	TAR GET 201 9	TAR GET 202 0	TAR GET 202 1	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUT COME)	TAR GET 201 7	TAR GET 201 8	TAR GET 201 9	TAR GET 202 0	TAR GET 202 1	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUT PUT)	TARG ET 2017	TARG ET 2018	TARG ET 2019	TARG ET 2020	TARG ET 2021
								partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	kehadiran RT dalam Rembug Warga / Musrenbang meningkat						kelompok masyarakat pembangunan desa	kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan					
									Persentase RT yang usul pembangunan dalam Musrenbang	92	95	98	100	100	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan desa	Tersusunnya Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	110	110	113	113	116
									Persentase kondisi sarana prasarana lingkungan Kelurahan yang ditangani lewat Musrenbang	66	70	75	80	90	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Laporan hasil Monev, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang	17	17	17	17	17
															Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil Musrenbang	Terlaksananya Fasilitasi kegiatan hasil musrenbang	17	17	20	20	20
															Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarpas umum	Pelaksanaan pengelolaan sarpras umum	303 kgt	0	0	0	0
															Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	103	109	118	125	130
															Pemberdayaan	Jumlah paket	36	0	0	0	0

	ESELON II							ESELON III							ESELON IV						
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET 20 17	TAR GET 201 8	TAR GET 201 9	TAR GET 202 0	TAR GET 202 1	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUT COME)	TAR GET 201 7	TAR GET 201 8	TAR GET 201 9	TAR GET 202 0	TAR GET 202 1	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUT PUT)	TARG ET 2017	TARG ET 2018	TARG ET 2019	TARG ET 2020	TARG ET 2021
															masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat	kegiatan pembangunan sarana peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang					
															Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan pemukiman	Jumlah paket kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	164	170	175	180	185
															Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil musrenbang	Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	60	65	70	75	80
								Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya jumlah kelurahan yang mengimplementasikan program LHBS dan PHBS	100 %					Fasilitasi forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat	prosentase jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Penyelesaian permasalahan di Kecamatan dengan Program dan Kegiatan

Pada tabel berikut akan dijelaskan rumusan permasalahan pada Kecamatan Gunungpati yang akan diselesaikan dengan program dan kegiatan :

TABEL 6.1**MATRIK PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI KECAMATAN DENGAN PROGRAM - KEGIATAN**

No.	Permasalahan Pokok	Akar Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	Belum optimalnya penanganan kebersihan wilayah Kecamatan / Kelurahan	Pengelolaan kebersihan wilayah perlu ditingkatkan secara berkelanjutan	Meningkatkan kebersihan wilayah Kecamatan dan Kelurahan secara berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan 2. Koordinasi Penilaian Adipura
2.	Belum optimalnya program PHBS dan LHBS di wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat perlu ditingkatkan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan lingkungan bersih serta sehat	Program Peningkatan Lingkungan Sehat	1. Fasilitasi Forum Kota Sehat (FKK) Kecamatan / Kelurahan
3.	Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan 2. Masih kurangnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman 3. Kuantitas dan kualitas anggota Linmas belum memadai	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan serta perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan	1. Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Tramtibum 2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
4.	Perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	1. Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan perlu dioptimalkan 2. Koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2. Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat - Kp.Tematik)

5.	Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan perlu ditingkatkan 2. Kondisi sarana dan prasarana lingkungan perlu perbaikan dan peningkatan 3. Potensi lokal kewilayahan perlu dukungan pembinaan dan pengembangan 	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan representatif	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan 2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 5. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan 6. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingk. 7. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang
6.	Belum optimalnya pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP 2. Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar 3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik 4. Belum optimalnya budaya kerja aparatur 5. Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur perlu ditingkatkan 	Meningkatkan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan 2. Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 3. Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur 4. Broadband Learning Centre (BLC)
7.	Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan	Perlu peningkatan tertib pencatatan dan pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan	Meningkatkan manajemen pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan	Program Pengelolaan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan
8.	Belum optimalnya penerimaan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan / Kelurahan	Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Mengoptimalkan potensi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan dan Kecamatan secara intensif	Program Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
9.	Perlunya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan dan Kelurahan secara rutin untuk keberlangsungan operasional	<p>Kebutuhan rutin kantor Kecamatan dan Kelurahan terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran rekening listrik, telpon dan air tiap bulan untuk kantor 2. Alat tulis kantor 	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Kecamatan Gunungpati	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Jasa Komunikasi, SDA, Listrik 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

		3. Barang cetakan dan penggandaan 4. Penggantian komponen instalasi listrik / lampu penerangan kantor 5. Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu 6. Perjalanan dinas ke luar daerah 7. Pembayaran jasa penunjang administrasi perkantoran			4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 5. Penyediaan Makanan dan Minuman 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 8. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 9. Belanja operasional kelurahan
10.	Perlunya pemenuhan kebutuhan untuk peningkatan sarana dan prasarana kerja / operasional aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Kebutuhan rutin kantor Kecamatan dan Kelurahan terhadap : 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Camat dan Lurah 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kerja 7. Pemeliharaan rutin / berkala mebelair 8. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor, termasuk rumah dinas dan balai Kelurahan 9. Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas (perpanjangan STNK)	Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Kecamatan Gunungpati	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas 7. Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan Gedung Kantor 8. Pemeliharaan rutin / berkala Mebelair 9. Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas

11.	Perlunya pemenuhan kebutuhan untuk peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<p>Kebutuhan rutin SKPD Kecamatan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan 2. Menyusun Laporan Keuangan Semesteran 3. Menyusun Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 4. Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun 5. Menyusun RKA dan DPA 6. Menyusun LKjIP 7. Menyusun Renstra Perangkat Drh 8. Menyusun LKPJ Perangkat Drh 9. Menyusun Renja Perangkat Drh 10. Menunjang Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu 	Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan Gunungpati	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 4. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5. Penyusunan RKA dan DPA 6. Penyusunan LKjIP 7. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 8. Penyusunan LKPJ Perangkat Drh 9. Penyusunan Renja Perangkat Daerah 10. Penunjang Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembangunan
-----	---	---	---	--	---

Dari matrik penyelesaian permasalahan dengan program dan kegiatan diatas, berdasarkan permasalahan pokok dan akar permasalahan didapatkan kebijakan, program dan kegiatan yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah yang ada.

Keterkaitan permasalahan diatas dapat dilihat dalam matrik keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta indikatornya renstra kecamatan Gunungpati kota semarang tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

TABEL 6.2
MATRIK KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA
RENSTRA KECAMATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2016 – 2021

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4	Program 5	Kegiatan 6
<p>Tujuan 1</p> <p>Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, dan melayani</p> <p>Indikator :</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>	<p>Sasaran 1 :</p> <p>Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan OPD</p> <p>Indikator 1</p> <p>Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Indikator 2</p> <p>Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan</p>	<p>Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan</p>	<p>Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan</p>	<p>1. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum serta pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Indikator :</p> <p>a. Persentase ketersediaan sarpras pelayanan masyarakat berbasis PATEN</p> <p>b. Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan</p>	<p>1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan</p> <p>Sasaran :</p> <p>Terselenggaranya tata pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan normatif</p> <p>Indikator :</p> <p>Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</p>
					<p>2. Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya etos dan budaya kerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Indikator :</p> <p>Jumlah kegiatan pembinaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja</p>

					<p>3. Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</p> <p>Sasaran : Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan yang berbasis PATEN</p> <p>Indikator : Jumlah pelayanan administratif dan ketersediaan sarana prasarana di Kantor Kecamatan dan Kelurahan yang berstandar PATEN</p>
					<p>4. Broadband Learning Centre (BLC)</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi</p> <p>Indikator : Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi masyarakat</p>
		Peningkatan pendayagunaan aset Kecamatan/ Kelurahan	Meningkatkan manajemen pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan	<p>2. Program Pengelolaan Aset Daerah</p> <p>Sasaran : Terpeliharanya aset pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Indikator : Jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan</p>	<p>1. Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan</p> <p>Sasaran : Terwujudnya pencatatan dan pengelolaan aset pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan yang tertib</p> <p>Indikator : Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan</p>
		Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Mengoptimalkan potensi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan dan Kecamatan secara intensif	<p>3. Program Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Sasaran : Meningkatnya perolehan pajak oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Indikator : Persentase jumlah wajib pajak yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan</p>	<p>1. Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p> <p>Indikator : Persentase Jumlah penerimaan pembayaran PBB Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan</p>
		Meningkatkan Kinerja Pelayanan	Peningkatan Kualitas Pelayanan	<p>4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p>	<p>1. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, Listrik</p> <p>Sasaran :</p>

		Kecamatan Gunungpati	Administrasi Aparatur Kecamatan Gunungpati	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Indikator : Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Komunikasi, sumber daya air dan penerangan kantor Indikator : 2. Jumlah rekening telpon, air, listrik dan koran kantor
					2. Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Sasaran : Tersedianya komponen listrik dalam menunjang penerangan kantor Indikator : Jumlah komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan
					3. Penyediaan Alat Tulis Kantor Sasaran : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Indikator : Jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan
					4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sasaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan kebutuhan kantor Indikator : Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan
					5. Penyediaan Makanan Dan Minuman Sasaran : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat menunjang kinerja Indikator : Jumlah kegiatan rapat-rapat penunjang kinerja

					6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sasaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan kementerian / lembaga terkait kinerja program Indikator : Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan
					7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Sasaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah/ Lembaga / Instansi lainnya terkait kinerja program Indikator : Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan
					8. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Sasaran : Terlaksananya lembur guna menunjang pekerjaan Indikator : Jumlah kegiatan lembur PNS
					9. Penyediaan operasional kelurahan Sasaran : Tersedianya penyediaan operasional kelurahan Indikator: Jumlah kegiatan penyediaan operasional kelurahan
			Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Kecamatan Gunungpati	5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sasaran : Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur Indikator : Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sasaran : Meningkatnya fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai Indikator : Tersedianya fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai
					2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sasaran : Meningkatnya fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja

					pegawai Indikator : Tersedianya fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai
					3. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Sasaran : Meningkatnya fasilitas kendaraan dinas operasional yang mendukung kerja pegawai Indikator : Tersedianya fasilitas kendaraan dinas operasional yang mendukung kerja pegawai
					4. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor Sasaran : Meningkatnya fungsi gedung kantor guna menunjang kinerja pegawai Indikator : Jumlah komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan
					5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Sasaran : Meningkatnya fungsi rumah dinas guna menunjang pekerjaan Indikator : Jumlah kegiatan pemeliharaan rumah dinas
					6. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor Sasaran : Berfungsinya peralatan gedung kantor guna menunjang kinerja Indikator : Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
					7. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional Sasaran : Meningkatnya fungsi kendaraan dinas operasional guna menunjang kinerja pegawai Indikator : Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan

					8. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Sasaran : Meningkatnya fungsi mebeleur guna menunjang pekerjaan Indikator: jumlah mebeleur yang diperbaiki
					9. Rehabilitasi Ringan / Sedang Gedung Kantor Sasaran : Meningkatnya fungsi gedung kantor guna meningkatkan kinerja pegawai Indikator : Jumlah perbaikan ringan / sedang gedung kantor
					10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas Sasaran : Meningkatnya pemeliharaan dan terpenuhinya perijinan kendaraan dinas operasional Indikator : Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
			Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan Gunungpati	6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sasaran : Meningkatnya dan dikembangkannya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Indikator : Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah setiap tahun Indikator : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun berkenaan
					2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Sasaran : Meningkatnya kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah setiap tahun Indikator : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun berkenaan

					<p>3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah setiap tahun</p> <p>Indikator : Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</p>
					<p>4. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun..</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah</p> <p>Indikator : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah</p>
					<p>5. Penyusunan RKA dan DPA</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas RKA dan DPA Perangkat Daerah setiap tahun</p> <p>Indikator : Jumlah RKA dan DPA Perangkat Daerah</p>
					<p>6. Penyusunan LKjIP</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas LKjIP Perangkat Daerah setiap tahun</p> <p>Indikator : Tersusunnya LKjIP Perangkat Daerah</p>
					<p>7. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas Renstra Perangkat Daerah</p> <p>Indikator : Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah</p>
					<p>8. Penyusunan LKPJ Perangkat Daerah</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas LKPJ Perangkat Daerah</p>

					Indikator : Tersusunnya LKPJ Perangkat Daerah
					9. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah Indikator : Tersusunnya Renja Perangkat Daerah
					10. Penunjang Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu. Sasaran : Meningkatnya target kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu Indikator : Terpenuhinya target kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu
Tujuan 2 Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang memberdayakan masyarakat Indikator Tingkat partisipasi masyarakat	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan wilayah Kecamatan yang bersih dan sehat berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kebersihan wilayah Kecamatan dan Kelurahan secara berkelanjutan	7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Sasaran : Terpeliharanya kebersihan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan Indikator : a. Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan b. Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	1. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Sasaran : Terselenggaranya kegiatan kebersihan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan Indikator : Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon dll yang dilakukan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
					2. Koordinasi Penilaian Adipura Sasaran : Terkoordinasinya kondisi yang dipersyaratkan Adipura di wilayah Kelurahan Indikator :

					Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan lingkungan bersih serta sehat	8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Sasaran : Meningkatnya jumlah Kelurahan yang mengimplementasikan program LHBS dan PHBS Indikator : Jumlah Kelurahan yang melaksanakan program LHBS dan PHBS	1. Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat Sasaran : Meningkatnya lingkungan di Kelurahan yang memenuhi LHBS dan PHBS Indikator : Persentase jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria Lingkungan Hidup Bersih Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
		Peningkatan ketertiban dan ketentraman lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan serta perlindungan masyarakat	9. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan Sasaran : Meningkatnya ketertiban dan ketentraman lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat Indikator : Persentase jumlah sistem keamanan lingkungan (Siskamling) RT	1. Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum Sasaran : Meningkatnya ketertiban dan ketentraman lingkungan melalui penegakan peraturan dan pemantauan wilayah rawan trantibum Indikator : Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan
					2. Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat Sasaran : Meningkatnya jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan Indikator : Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan
		Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal wilayah Kecamatan dan Kelurahan	10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Sasaran : Meningkatnya jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Indikator : Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan	1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Sasaran : Meningkatnya jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Indikator : Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (LPMK, PKK, Karang Taruna, RW dan RT)

				Sasaran Meningkatnya jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Indikator : Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat - Kampung Tematik)	
					2. Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat) Sasaran : Meningkatnya jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Indikator : Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan representatif	11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Sasaran : a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dlm pembangunan melalui kehadiran perwakilannya di Musrenbang Indikator : Persentase kehadiran RT dalam Rembug Warga / Musrenbang b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui usulan pembangunan di Musrenbang Indikator : Persentase RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Musrenbang Indikator : Persentase kondisi sarana prasarana lingkungan Kelurahan yang ditangani	1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Sasaran : Meningkatnya pembinaan dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan Indikator : Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan

				lewat musrenbang	
					<p>2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Musrenbang</p> <p>Indikator : Tersusunnya Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan</p>
					<p>3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan, monev dan lomba berbasis pemberdayaan</p> <p>Indikator : Laporan hasil Monev, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang</p>
					<p>4. Fasilitasi Pelaksanaan Hasil Musrenbang</p> <p>Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik</p> <p>Indikator : Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan</p>
					<p>5. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan melalui pelaksanaan hasil Musrenbang</p> <p>Indikator : Jumlah kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang</p>
					<p>6. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan</p>

					Sasaran : Meningkatnya kualitas saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan melalui pelaksanaan hasil Musrenbang Indikator : Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang
					7. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan non fisik Indikator : Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan

Sedangkan tabel Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel di bawah ini

TABEL 6.3
KEGIATAN DAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN RENSTRA SKPD
KECAMATAN GUNUNGPATI TAHUN 2016-2021

		Program/Kegiatan / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
3.06.18		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN		0	14.600.000	310.651.000	313.758.000	316.895.000	320.064.000
6.18	6	PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI KECAMATAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN TRANTIBUM	Rp.	0	14.600.000	310.651.000	313.758.000	316.895.000	320.064.000
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran	%	0	80	85	90	95	100
3.06.23		PROGRAM PENUNJANG PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT		0	450.065.000	468.308.000	472.991.000	477.721.000	482.498.000
6.23	1	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	Rp.	0	450.065.000	468.308.000	472.991.000	477.721.000	482.498.000
		prosentase jumlah RW di Kelurahan yang	%	0	100	100	100	100	100
3.06.16		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		92.470.000	97.633.000	91.276.000	92.169.000	93.111.000	94.042.000
6.16	1	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	Rp.	92.470.000	97.633.000	25.500.000	30.600.000	31.111.000	32.000.000
		Persentase jumlah titik pantau Adipura di	%	0	100	100	100	100	100
	2	PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	Rp.			65.776.000	61.589.000	62.000.000	62.042.000
		Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon dll yang dilakukan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	jumlah	0	0	64	64	64	64
3.06.20		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN		2.906.795.000	884.250.000	1.571.005.000	1.586.715.000	1.602.583.000	1.618.608.000
6.2	1	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	Rp.	2.356.795.000	0	526.005.000	1.541.715.000	1.557.583.000	1.573.608.000
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	kegiata	2	0	7780	7842	7921	8097
6.2	3	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Rp.	550.000.000	580.000.000	1.045.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
		jumlah kegiatan penanggulangan	kelurah	7	7	9	5	5	5
6.2	4	PEMBERDAYAAN LPMK, RW DAN RT	Rp.	0	194.900.000	0	0	0	0
		Terlaksananya fasilitasi kegiatan kelompok	kegiata	0	7500	0	0	0	0
6.2	5	PEMBERDAYAAN PKK, KARANG TARUNA DAN PRAMUKA	Rp.	0	109.350.000	0	0	0	0
		Terlaksananya pemberdayaan PKK,karang	kegiata	0	50	0	0	0	0
3.06.21		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN		16.358.525.374	16.480.256.000	16.291.389.000	16.310.865.000	16.553.086.000	16.764.401.000
6.21		PENINGKATAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	Rp.	188.500.000	158.050.000	178.150.000	195.500.000	201.000.000	210.000.000
		Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di	kegiata	32	34	36	38	40	41
6.21	2	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	Rp.	80.650.000	70.350.000	91.455.000	118.891.000	125.600.000	130.400.000
		Tersusunnya Daftar Skala Prioritas	dokume	109	110	110	113	113	116
6.21	3	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	Rp.	87.635.000	42.600.000	22.650.000	28.500.000	31.250.000	35.600.000

Renstra Kabupaten Kecamatan Gunungpati 2016-2021

3.06.25		PROGRAM PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH		0	0	53.563.000	54.099.000	526.773.000	532.040.000
6.24	4	MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN	Rp.	0	0	53.563.000	54.099.000	526.773.000	532.040.000
		Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di	angka	0	0	344	347	350	350

Sedangkan untuk tujuan OPD, sasaran strategis OPD, outcome dan output dapat dilihat pada Cascading Kecamatan Gunungpati (Terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Kecamatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bab ini akan disampaikan Indikator pada Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ada pada Bab V dan IX RPJMD

TABEL 7.1**KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN YANG MENDUKUNG KINERJA DAERAH**

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1.	Tingkat partisipasi masyarakat	%	74,62	75,73	77,67	79,52	81,11	82,3	83,17	83,17
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka indeks	-	-	79	81	83	85	87	87
3.	Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang	%	87	87,68	88,44	90,68	92,15	93,92	95,08	95,08
4.	Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang	%	94,88	95,32	96,52	97,66	98,31	99,04	99,48	99,48
5.	Persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang	%	42	44,21	48,06	50,24	52,87	53,94	54,84	54,84

Terdapat lima (5) indikator Kinerja Daerah Pada Kecamatan Gunungpati, pada indikator tersebut diatas diharapkan mengalami peningkatan tiap tahunnya, sehingga diharapkan pada akhir periode Renstra hasil yang dicapai sesuai , baik dari sasaran RPJMD maupun sasaran Renstra Kecamatan Gunungpati.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Semarang Gunungpati tahun 2016-2021 disusun sebagai pedoman, dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan dalam selama kurun waktu lima tahun. Renstra ini merupakan hasil kerja dari seluruh pegawai se Kecamatan Gunungpati dengan tetap memperhatikan masukan dari tokoh masyarakat dan *stakeholders*

terkait. Arah pembangunan selama lima tahun ke depan, Kecamatan Gunungpati berobsesi untuk menjadi unit pelayanan yang handal dengan senantiasa tetap melestarikan potensi budaya dan kearifan lokal yang ada. Penyusunan renstra selain didasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah juga didasarkan pada RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021.

Pemerintah Kecamatan Gunungpati berharap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat terimplementasikan secara maksimal sehingga pada periode lima tahun berikutnya menjadi tahapan baru untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan dalam rangka program pembangunan jangka panjang kecamatan. Selain perlu dukungan yang optimal dari segenap *stakeholders*, Pemerintah Kecamatan Gunungpati senantiasa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar tugas-tugas pelayanan publik ini dapat terlaksana dengan baik.

Penyusunan Renstra ini juga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Tahunan (Renja), dan dokumen lainnya. Seiring dengan perkembangan kebijakan, dokumen Renstra ini bersifat fleksibel maksudnya dapat dirubah atau dilakukan penyesuaian seperlunya.

Demikian dokumen Renstra ini disusun semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat bagi kemajuan Kecamatan Gunungpati pada umumnya dan meningkatkan kualitas pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu lima tahun kedepan.